

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas adalah salah satu konsep utama dan paling penting dalam mencapai *good governance*. Akuntabilitas adalah istilah yang digunakan dalam konteks birokrasi pemerintah untuk menggambarkan bagaimana tujuan suatu organisasi telah tercapai. Akuntabilitas publik berpusat pada pertanyaan siapa yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pertanggungjawaban publik atas kebijakan dan kegiatan pemerintah, karena pada hakekatnya lembaga birokrasi pemerintah diciptakan untuk melayani kepentingan publik (Sawir, 2017). Saat ini, salah satu gagasan tata kelola yang baik yang paling banyak diterima adalah akuntabilitas. Pemerintah daerah bertanggung jawab kepada publik dengan memberikan akses terhadap informasi mengenai kinerja dan operasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Tujuan utama reformasi sektor publik, khususnya reformasi keuangan, adalah untuk mencapai akuntabilitas. Masyarakat meminta pertanggungjawaban pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung (Handoko, 2021).

Laporan keuangan pada lembaga pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan dan mendominasi terhadap akuntabilitas, meskipun bukan merupakan satu-satunya sumber informasi (Mardiasmo, 2002). Laporan keuangan pemerintah mempunyai dampak yang signifikan terhadap akuntabilitas. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah harus mengikuti pedoman yang ketat agar dapat menghasilkan data yang berkualitas. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan harus memenuhi persyaratan kualitatif tertentu agar dapat memenuhi syarat sebagai informasi akuntansi. Agar laporan keuangan memenuhi standar

normatif kualitas yang diharapkan, laporan tersebut harus memenuhi setidaknya empat persyaratan: laporan tersebut harus relevan, dapat dipahami, dapat diandalkan, dan dapat dibandingkan.

Dibandingkan dengan akun-akun lainnya dalam laporan keuangan pemerintah daerah, aset tetap daerah/barang milik daerah memiliki nilai yang paling besar dan signifikan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan mengenai aset tetap daerah/barang milik daerah memiliki kualitas tinggi, khususnya dalam hal keakuratan pelaporan. Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2016) menyatakan bahwa pengelolaan barang milik daerah wajib dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) badan pemeriksa keuangan RI (BPK RI) masih fokus pada permasalahan pelaporan aset daerah. Penyelesaian permasalahan pelaporan aset diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan aset daerah, khususnya yang berkaitan dengan aset tetap (*clearance fixed assets*) (BPK RI, 2012).

Kabupaten Enrekang merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Pemerintah Kabupaten Enrekang masih memiliki temuan-temuan mengenai pengelolaan barang milik daerah yang perlu ditindaklanjuti, sebagai pemerintah daerah yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap LKPD tahun 2018–2022 dari BPK-RI. Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masih ditemukan berbagai permasalahan terkait pelaporan aset tetap, termasuk di Kabupaten Enrekang. Permasalahan tersebut menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pencatatan, pengelolaan, maupun pengendalian atas aset tetap. Berikut disajikan beberapa temuan BPK yang relevan:

Tabel 1.1 Temuan BPK

Tahun Pemeriksaan	Uraian Temuan
2020	Pembaruan data inventaris aset. Beberapa aset yang sudah tidak produktif atau mengalami penyusutan tetap tercatat dengan nilai buku yang tidak akurat. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kondisi fisik aset dengan data administrasi yang tercatat.
2020	246 kendaraan yang tidak membayar pajak sehingga plat kendaraan sudah tidak berlaku pada saat pemeriksaan fisik.
2020	13 kendaraan senilai Rp. 217.504.359,- tidak ditemukan STNK dan BPKB pada saat pemeriksaan fisik.
2021	Informasi KIB (Kartu Inventaris Barang) belum lengkap
2022	Ada 5 kendaraan yang belum ditemukan yang merupakan aset milik pemerintah daerah
2022	Ada 4 bangunan sekolah yang belum tercatat pada KIB C (Gedung dan bangunan)
2022	Informasi KIB (Kartu Inventaris Barang) belum lengkap

(Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, Tahun 2020–2022)

Temuan di atas mengindikasikan bahwa pelaporan aset tetap di Kabupaten Enrekang belum sepenuhnya akurat dan andal. Temuan tersebut menunjukkan masih banyak ditemukan kelemahan dari beberapa aspek dan diperlukan perbaikan dari beberapa sisi. Hal ini dapat berdampak pada opini BPK terhadap laporan keuangan serta menurunkan kualitas tata kelola keuangan daerah secara keseluruhan.

Meskipun pemerintah daerah telah memiliki sistem akuntansi berbasis akrual dan regulasi yang mengatur pencatatan aset tetap, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai penyimpangan dan ketidaksesuaian antara data yang tercatat dengan kondisi di lapangan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan

antara kebijakan yang telah diterapkan dengan pelaksanaannya secara faktual. Salah satu contohnya dapat dilihat pada temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Kabupaten Enrekang, di mana masih ditemukan aset tetap yang tidak tercatat dengan benar, tidak memiliki dokumen kepemilikan yang lengkap, atau bahkan tidak dapat ditemukan secara fisik. Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan penting: mengapa ketidakakuratan pelaporan aset tetap masih terjadi, meskipun sistem dan prosedur telah ditetapkan? Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor-faktor lain di luar sistem formal yang memengaruhi kualitas pelaporan, seperti faktor individu, organisasi, dan lingkungan kerja.

Meyer (2001) menemukan bahwa tindakan seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor dalam memenuhi kewajiban dan mengambil keputusan. Faktor-faktor ini dapat dibagi menjadi kategori internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari pengetahuan dan persepsi etis sedangkan faktor eksternal terdiri dari tekanan atasan dan kompleksitas tugas. Penelitian menunjukkan bahwa kemampuan seorang pengelola aset tetap dalam melaksanakan tugas pembuatan laporan aset daerah dapat dipengaruhi oleh pertimbangan internal dan eksternal.

Salah satu faktor internal yang dikemukakan di atas adalah pengetahuan. Menurut Libby (1995) dalam Diani dan Ria (2007), kinerja seorang profesional dapat dievaluasi berdasarkan beberapa faktor, seperti keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman. Menurut Bonner (2002), profesi seseorang ditentukan oleh tingkat penguasaan dan pelaksanaannya dalam memberikan pelayanan atau menyelesaikan tugas. Ini mencakup tiga elemen kunci: pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Hal serupa juga diungkapkan Diani dan Ria (2007) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan keterampilan seorang profesional menunjang kualitas pekerjaannya. Jadi penting bagi seorang pengelola aset memiliki pengetahuan yang memadai tentang bagaimana cara

mengelola aset dengan baik hingga tidak menimbulkan adanya kesalahan dalam membuat laporan aset tetap.

Faktor internal lainnya yaitu persepsi etis. Kualitas yang tidak kalah penting dari pengetahuan yang perlu dimiliki seorang profesional untuk menjalankan profesinya adalah moralitas. Para profesional sering kali berada pada kondisi dilematis yang harus memilih antara kewajiban mereka untuk bertindak dengan objektif dan berintegritas atau prinsip-prinsip etika yang bertentangan dengan konsep yang mereka miliki (Ida, 2003). Pengelola atau pejabat aset daerah sering kali harus membuat keputusan yang mematuhi kode etik selain standar kerja saat ini.

Pengelola aset daerah harus menyadari mengenai masalah etika. Pengelola aset daerah sangat membutuhkan kepastian kualitas layanan yang diberikan. Etika merupakan syarat mendasar yang tidak dapat ditawar lagi dalam profesi pengelola aset yang dibangun atas dasar kepercayaan (Ida, 2003). Etika menyediakan kerangka kerja yang dapat digunakan oleh individu untuk membentuk persepsi etis mereka. Pelaporan yang akurat mencerminkan transparansi dan kejujuran manajemen. Ketika aset tetap dilaporkan dengan benar, ini menunjukkan bahwa perusahaan beroperasi dengan integritas tinggi, yang meningkatkan persepsi etis baik dari dalam maupun luar organisasi.

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi akurasi pelaporan aset tetap adalah tekanan dari atasan. Dalam lingkungan birokrasi pemerintah, struktur organisasi yang hierarkis menjadikan perintah dan arahan atasan memiliki pengaruh besar terhadap cara pegawai bekerja dan mengambil keputusan, termasuk dalam proses pelaporan keuangan. Tekanan atasan dapat muncul dalam bentuk permintaan percepatan pekerjaan, penekanan terhadap hasil tertentu, atau tuntutan untuk menyesuaikan laporan dengan ekspektasi pimpinan, yang terkadang bertentangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Tekanan

atasan, dalam konteks positif, dapat menjadi bentuk kontrol dan pengawasan yang mendorong pegawai untuk bekerja lebih disiplin, teliti, dan sesuai aturan, termasuk dalam proses pencatatan dan pelaporan aset tetap.

Menurut Sari dan Sudarma (2013), tekanan atasan yang bersifat konstruktif dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan pegawai terhadap aturan pelaporan keuangan, sehingga berdampak positif terhadap akurasi laporan yang dihasilkan. Dalam organisasi pemerintah daerah, atasan memiliki posisi strategis dalam membentuk budaya kerja dan menanamkan pentingnya ketepatan dan keandalan data aset sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah. Dengan pengawasan yang konsisten dan arahan yang jelas dari atasan, pegawai termotivasi untuk menyusun laporan aset tetap dengan lebih cermat dan akurat.

Mereka yang berprofesi sebagai pengelola atau pejabat yang bertugas mengawasi aset daerah terkadang bekerja dalam kondisi penuh tekanan. Salah satu dari sepuluh profesi dengan tingkat stres tertinggi adalah menyiapkan laporan pertanggungjawaban (keuangan, aset, atau sejenisnya), menurut penelitian Miller et al. (1988) dalam Murtiasari dan Ghozali (2006). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pembuat laporan akuntabilitas menghadapi kompleksitas tugas yang tinggi dari pekerjaannya selain konflik peran (Asih, 2010).

Kompleksitas tugas merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi kinerja seseorang ketika mengambil keputusan atau melakukan tindakan (Bonner, 2002). Mayoritas tindakan dan keputusan yang berkaitan dengan pelaporan kekayaan daerah mempunyai bobot paling besar dalam hal kewajiban pelaporan keuangan. Kompleksitas tugas para profesional yang melaporkan kekayaan daerah sebagai bagian dari pelaporan keuangan relatif tinggi. Menurut Bonner (2002), pengujian kompleksitas tugas untuk situasi pelaporan keuangan diperlukan karena tiga alasan yang sangat mendasar. Pertama, diyakini bahwa

kompleksitas tugas secara signifikan mempengaruhi kinerja peserta. Kedua, ketika peneliti menyadari kekhasan kompleksitas tugas pelaporan keuangan termasuk aset, mereka diyakini telah mengkondisikan pelatihan dan alat serta teknik pengambilan keputusan tertentu. Ketiga, dengan memahami kompleksitas suatu tugas, tim pengelolaan/manajemen aset daerah dapat menentukan strategi penempatan staf dan pengelolaan tugas yang optimal (Asih, 2010).

Menurut temuan penelitian Chung dan Monroe (2001), pengelola keuangan dan aset, yaitu pengguna barang dan aset dipengaruhi oleh kompleksitas tugas yang tinggi ketika mengambil keputusan atau mengambil tindakan. Temuan serupa juga ditemukan pada penelitian Abdolmohammadi dan Wright (1987), yang menunjukkan bahwa keputusan yang diambil oleh seorang individu (pengguna barang/kuasa pengguna barang) pada kompleksitas rendah dan tinggi berbeda satu sama lain. Informasi yang dimiliki pengguna barang dan pengguna barang mendukung keakuratan pelaporan aset daerah yang dibuatnya. Pengetahuan ini mencakup informasi umum dan khusus, serta informasi tentang ruang lingkup “proses bisnis” dan pengetahuan tentang bidang regulasi, keuangan, dan akuntansi. Pengguna atau pengelola barang dapat memperoleh pengetahuan ini melalui pendidikan formal, pelatihan teknis, dan pengalaman.

Akurasi pelaporan aset tetap merupakan aspek krusial dalam pengelolaan keuangan organisasi. Beberapa faktor seperti pengetahuan, persepsi etis, tekanan atasan, dan kompleksitas tugas telah diidentifikasi sebagai determinan utama yang memengaruhi akurasi tersebut. Namun, pengaruh faktor-faktor ini dapat bervariasi tergantung pada tingkat komitmen organisasi yang dimiliki oleh individu. Komitmen organisasi, yang mencerminkan sejauh mana individu merasa terikat dan bertanggung jawab terhadap tujuan organisasi, dapat berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara faktor-

faktor tersebut dengan akurasi pelaporan aset tetap. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran komitmen organisasi sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara tekanan atasan, kompleksitas tugas, pengetahuan, dan persepsi etis terhadap akurasi pelaporan aset tetap

Selanjutnya, untuk menghasilkan laporan aset tetap yang berkualitas dan akurat sesuai dengan standar bukanlah sesuatu yang mudah, perlu kesiapan dan koordinasi seluruh unit entitas dan unit pelaporan yang berhubungan dengan aset tetap untuk melaksanakan peran dan kewenangan masing-masing dalam penyusunan laporan aset tetap. Menurut Allen dan Meyer (1990) komitmen organisasional dapat diwujudkan dengan adanya kepercayaan pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi bagian dalam organisasi. Mowday *et al.* (1982) menyatakan bahwa komitmen yang kuat dalam organisasi akan dapat menciptakan keyakinan dan dukungan serta loyalitas karyawan terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi sangat penting karena memiliki hubungan yang erat dengan kinerja pegawai, di mana setiap pegawai dituntut memiliki kinerja yang baik dalam pekerjaannya. Carsten dan Spector dalam Adifitya (2014:837) mengatakan bahwa semakin tinggi komitmen organisasi maka akan berdampak pada karyawan akan tetap tinggal dalam organisasi dan akan selalu meningkatkan kinerjanya. Kinerja karyawan yang tinggi akan menghasilkan laporan aset tetap yang andal dan akurat.

Untuk memahami perilaku individu dalam pelaporan aset tetap, perlu ditinjau dari pendekatan perilaku organisasi dan motivasi kerja. Salah satu Teori Yang relevan adalah Teori X dan Y yang dikembangkan oleh Douglas McGregor. Dalam *The Human Side of Enterprise* (1960), McGregor membagi asumsi pimpinan terhadap pegawai ke dalam dua pendekatan utama. Teori X menyatakan

bahwa pegawai cenderung pasif, tidak menyukai pekerjaan, dan hanya akan bekerja apabila diawasi secara ketat. Sebaliknya, Teori Y berpandangan bahwa pegawai mampu bekerja secara mandiri, memiliki tanggung jawab, dan akan termotivasi apabila diberikan kepercayaan dan dukungan organisasi (McGregor, 1960).

Dalam konteks pelaporan aset tetap, pegawai yang bekerja dalam lingkungan yang menerapkan prinsip Teori Y cenderung memiliki motivasi intrinsik untuk menghasilkan laporan yang akurat, karena mereka merasa dihargai dan memiliki tanggung jawab profesional. Sebaliknya, dalam lingkungan kerja yang lebih menekan (karakteristik Teori X), akurasi pelaporan bisa dipengaruhi oleh tekanan atasan atau budaya kerja yang kurang mendukung akuntabilitas.

Selain itu, penelitian ini juga berlandaskan pada Teori Penetapan Tujuan (*Goal Setting Theory*) yang dikembangkan oleh Locke dan Latham. Teori ini menyatakan bahwa tujuan yang spesifik, jelas, dan menantang akan meningkatkan kinerja individu, khususnya jika tujuan tersebut diterima dan didukung oleh lingkungan kerja (Locke & Latham, 2002). Dalam konteks pemerintah daerah, apabila tujuan pelaporan aset tetap disampaikan secara jelas dan disertai penguatan dari atasan serta budaya organisasi yang positif, maka pegawai akan lebih termotivasi untuk melakukan pelaporan yang akurat. Kedua teori tersebut memberikan kerangka konseptual untuk menjelaskan bagaimana faktor-faktor seperti pengetahuan, persepsi etis, tekanan atasan, kompleksitas tugas, serta komitmen organisasi dapat memengaruhi akurasi pelaporan aset tetap. Dalam penelitian ini, Teori X dan Y serta Teori Penetapan Tujuan (*Goal Setting Theory*) digunakan untuk memahami motivasi dan perilaku pelaksana teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang, terutama dalam kaitannya dengan tanggung jawab mereka dalam melaporkan aset tetap secara akurat.

Penelitian ini dilakukan dengan mereplikasi penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widiyanto (2021) dan Haryanto (2014). Widiyanto (2021) menemukan bahwa tekanan atasan dan persepsi etis berpengaruh secara signifikan terhadap akurasi pelaporan aset tetap. Sementara itu, kompleksitas tugas dan pengetahuan berpengaruh tidak signifikan terhadap akurasi pelaporan aset tetap. Haryanto (2014) menemukan bahwa variabel tekanan ketaatan tidak memengaruhi pengguna barang/kuasa pengguna barang dalam menyusun dan menyajikan pelaporan aset daerah sementara penelitian yang dilakukan Jamilah, dkk (2007) dan Hartanto dan Wijaya (2001) menemukan bahwa dalam adanya tekanan ketaatan dan perintah menyimpang seseorang cenderung mentaati perintah tersebut dan hal ini dapat mendorong seseorang untuk bertindak yang tidak tepat.

Mendasarkan pada ketidakkonsistenan penelitian terdahulu dan latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor- faktor yang Mempengaruhi Akurasi Pelaporan Aset Tetap (Studi pada Pemerintah Kabupaten Enrekang)”**. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah pada penelitian kali ini menggunakan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi dan responden yang digunakan adalah pejabat penatausahaan barang milik daerah, pengelola barang milik daerah dan pengurus barang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian yang dirumuskan sebagai berikut.

1. Apakah pengetahuan berpengaruh positif terhadap akurasi pelaporan aset tetap daerah?

2. Apakah persepsi etis berpengaruh positif terhadap akurasi pelaporan aset tetap daerah?
3. Apakah tekanan atasan berpengaruh positif terhadap akurasi pelaporan aset tetap daerah?
4. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh positif terhadap akurasi pelaporan aset tetap daerah?
5. Apakah komitmen organisasi memperkuat pengaruh pengetahuan terhadap akurasi pelaporan aset tetap daerah?
6. Apakah komitmen organisasi memperkuat pengaruh persepsi etis terhadap akurasi pelaporan aset tetap daerah?
7. Apakah komitmen organisasi memperkuat pengaruh tekanan atasan terhadap akurasi pelaporan aset tetap daerah?
8. Apakah komitmen organisasi memperkuat pengaruh kompleksitas tugas terhadap akurasi pelaporan aset tetap daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Mendasarkan pada perumusan permasalahan yang diajukan dalam penelitian, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis.

1. Pengaruh pengetahuan terhadap akurasi pelaporan aset tetap daerah.
2. Pengaruh persepsi etis terhadap akurasi pelaporan aset tetap daerah.
3. Pengaruh tekanan atasan terhadap akurasi pelaporan aset tetap daerah.
4. Pengaruh kompleksitas tugas terhadap akurasi pelaporan aset tetap daerah.
5. Pengaruh komitmen organisasi memoderasi pengetahuan terhadap akurasi pelaporan aset tetap daerah.
6. Pengaruh komitmen organisasi memoderasi persepsi etis terhadap akurasi pelaporan aset tetap daerah.

7. Pengaruh komitmen organisasi memoderasi tekanan atasan terhadap akurasi pelaporan aset tetap daerah.
8. Pengaruh komitmen organisasi memoderasi kompleksitas tugas terhadap akurasi pelaporan aset tetap daerah.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap dunia pendidikan dan kalangan akademisi mengenai topik yang diteliti. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan menghubungkan Teori X dan Y McGregor dan Teori Penetapan Tujuan (*Goal Setting Theory*) untuk menjelaskan bagaimana perilaku manusia memengaruhi akurasi pelaporan aset tetap. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan kajian tambahan mengenai pengetahuan, persepsi etis, tekanan atasan, kompleksitas tugas, komitmen organisasi, dan akurasi pelaporan aset tetap.

2. Kegunaan Praktis

Sedangkan bagi organisasi sektor publik khususnya Pemerintah Kabupaten Enrekang diharapkan dari hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi nyata dalam pengelolaan dan manajemen aset tetap terutama dalam penentuan petugas pengelola aset tetap.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menguji dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi akurasi aset tetap pada pemerintah daerah Kabupaten Enrekang. Semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset tetap, yaitu pengguna barang, pejabat penatausahaan barang, dan pengurus barang pada OPD, adalah personel yang paling berperan dalam penyajian pelaporan aset tetap.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan untuk lebih memahami masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I telah disajikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II akan disajikan mengenai tinjauan literatur serta teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian.

BAB III KERANGKA PENELITIAN DAN HIPOTESIS

Pada bab III akan disajikan mengenai penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, kerangka konsep serta variabel penelitian.

BAB IV METODE PENELITIAN

Pada bab IV akan disajikan informasi tentang data penelitian, desain penelitian serta metode analisis data.

BAB V HASIL PENELITIAN

Pada bab V akan disajikan mengenai deskripsi data penelitian dan menyajikan hasil pengolahan data.

BAB VI PEMBAHASAN

Pada bab VI akan disajikan pembahasan dari tiap-tiap variabel atas hasil penelitian sehubungan dengan rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan.

BAB VII PENUTUP

Pada bab VII akan disajikan kesimpulan, implikasi penelitian, keterbatasan dan saran yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

Penelitian ini menggunakan teori yaitu, Teori X dan Y McGregor dan teori pendukung lainnya yaitu, Teori Penetapan Tujuan (*Goal Setting Theory*). Teori tersebut digunakan untuk mengurai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akurasi pelaporan aset tetap. Faktor internal berupa pengetahuan dan persepsi etis dan faktor eksternal berupa tekanan atasan dan kompleksitas tugas serta. Selain itu terdapat komitmen organisasi yang dapat memperkuat maupun memperlemah faktor-faktor tersebut.

2.1.1 Teori X dan Y McGregor

Douglas McGregor menciptakan teori motivasi yang dikenal sebagai Teori X dan Y pada tahun 1960. Asumsi yang dibuat manajer ketika berinteraksi dengan anggota staf membentuk dasar Teori X dan Y manajer dapat membuat asumsi positif (Teori Y) atau negatif (Teori X).

Empat asumsi yang berasal dari sudut pandang manajer/atasan digunakan dalam Teori X, yaitu sebagai berikut.

1. Pegawai tidak menyukai pekerjaannya, sehingga mereka menghindarinya.
2. Karena pegawai tidak menyukai pekerjaannya, atasan harus bersikap tegas, bertanggung jawab, atau menghukum.
3. Pegawai akan berusaha untuk menghindari tugas mereka dan, sebagai akibatnya, mencari celah dalam kebijakan perusahaan.
4. Pegawai kurang mempunyai ambisi

Selain itu, empat asumsi dari sudut pandang manajer/atasan digunakan dalam Teori Y, yaitu sebagai berikut.

1. Pegawai menikmati pekerjaannya dan menganggapnya biasa saja.
2. Ketika pegawai berdedikasi pada tujuan mereka, mereka mampu mengendalikan diri.
3. Pegawai pada umumnya memperoleh kemandirian dalam pekerjaannya.
4. Pegawai mampu mengambil pilihan terbaik.

Haryanto (2014) menyatakan bahwa pegawai yang masuk dalam kelompok tipe X akan bertindak dan mengambil keputusan yang kurang baik atau tidak tepat ketika terdapat tekanan atasan dan kompleksitas tugas yang intens. Pegawai tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya sehingga mengurangi keakurasian pelaporan aset. Haryanto (2014) lebih lanjut lagi menyatakan bahwa pegawai yang bertipe Y, bertindak dan mengambil keputusan yang tepat atau lebih baik meskipun terdapat tekanan atasan dan kompleksitas tugas yang intens.

2.1.2 Teori Penetapan Tujuan (*Goal Setting Theory*)

Teori Penetapan Tujuan (*Goal Setting Theory*) merupakan bagian dari teori motivasi yang dikemukakan oleh Edwin Locke pada akhir tahun 1960- an. Teori ini menegaskan bahwa niat individu untuk mencapai sebuah tujuan merupakan sumber motivasi kerja yang utama. Seorang individu dengan tujuan yang sulit, lebih spesifik dan menantang akan menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan tujuan yang tidak jelas dan mudah.

Teori Penetapan Tujuan (*Goal Setting Theory*) mengasumsikan bahwa ada suatu hubungan langsung antara definisi dari tujuan yang spesifik dan terukur dengan kinerja, jika seseorang (manajer/pejabat) tahu apa sebenarnya tujuan yang ingin dicapai oleh mereka, maka mereka akan lebih termotivasi untuk

mengerahkan usaha yang dapat meningkatkan kinerja mereka (Locke dan Lathan, 1990). Tujuan yang memiliki tantangan biasanya diimplementasikan dalam output dengan level yang spesifik yang harus dicapai.

Locke dan Lathan (1990) mengungkapkan bahwa terdapat dua jenis perilaku yang dapat diarahkan melalui sasaran (*goal-directed action*), yaitu tujuan yang diarahkan tanpa disadari (*no-consciously goal directed*) dan tujuan yang diarahkan secara sadar (*consciously goal directed atau purposeful actions*). Apabila seseorang mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai, maka akan memotivasi seseorang untuk mengupayakan peningkatan kinerja dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Haryanto (2014) mengungkapkan bahwa apabila pegawai mengetahui tujuan dan harapan atas kinerjanya, maka pegawai tersebut tidak akan bisa dipengaruhi oleh lingkungannya dalam melakukan pekerjaan yang kompleks. Pemahaman atas tujuan yang ditetapkan dapat membantu pegawai agar menghasilkan keputusan dan tindakan yang tepat. Saat seorang pegawai paham bahwa pekerjaannya ialah memberikan jasa profesionalnya untuk menginformasikan aset tetap daerah pada penyajian laporan keuangan, maka laporan aset daerah tersebut akan disusun secara akurat.

2.1.3 Akurasi Pelaporan Aset Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2020 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau oleh masyarakat umum digolongkan sebagai harta tetap. Karena aset tetap merupakan bagian terbesar dari aset pemerintah, maka aset tersebut penting dalam penyajian neraca, sesuai PSAP Nomor 71 tentang akuntansi aset tetap.

Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan lampiran I tentang kerangka konseptual akuntansi pemerintahan menyatakan bahwa agar informasi akuntansi dapat mencapai tujuannya, harus diwujudkan langkah-langkah normatif yang berkaitan dengan aspek kualitatif laporan keuangan. Salah satu ciri kualitatif laporan keuangan adalah keandalan. Meskipun informasi mungkin relevan, penggunaannya dapat menipu jika disajikan atau kualitasnya dipertanyakan. Kualitas keterverifikasian, netralitas, dan penyajian yang jujur semuanya terdapat dalam informasi yang dapat dipercaya. Selain atribut-atribut tersebut, akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah menganut prinsip keterbukaan yang lengkap dan penyajian yang wajar.

Perkembangan pelaporan aset daerah yang tepat merupakan cerminan dari pertimbangan dan pilihan yang diambil oleh pengelola aset tetap daerah dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Hogart dan Einhorn (1992), penilaian adalah perilaku dan proses kognitif yang dilakukan dalam pengambilan pilihan. Penilaian adalah proses pengumpulan informasi yang berkelanjutan, termasuk komentar terhadap tindakan sebelumnya, pengambilan keputusan apakah akan mengambil tindakan tambahan atau tidak, dan penerimaan informasi. Seorang profesional juga harus mempunyai pertimbangan dalam rangka melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Terkadang setiap pengelola aset tetap daerah mengambil keputusan berbeda ketika dihadapkan pada tugas dan permasalahan yang sama. Semakin banyak penilaian yang dipilih oleh pengelola aset tetap daerah, semakin akurat pelaporan aset daerah yang mereka hasilkan, sehingga mereka harus terus mengembangkan dan mengasah keterampilan mereka.

2.1.4 Pengetahuan

Menurut Mubarak (2011), pengetahuan adalah segala sesuatu yang dipelajari seseorang melalui pengalamannya, dan pengetahuan itu akan semakin kuat seiring bertambahnya pengalaman yang dimilikinya. Menurut Bolisani dan Bratianu (2018), pengetahuan berasal dari otak manusia dan selanjutnya dimasukkan ke dalam pengetahuan organisasi melalui interaksi sosial.

Menurut Haryanto (2014), pegawai dan *power user* yang mempunyai kemampuan mengelola aset tetap, meliputi perencanaan dan penganggaran, pembelian dan pengeluaran, penatausahaan dan pencatatan aset tetap, serta penyajian laporan aset tetap daerah, dianggap berpengetahuan luas di bidang pengelolaan barang milik daerah. Pengetahuan tentang manajemen aset terus menjadi ukuran seberapa baik pegawai memahami manajemen aset pada tingkat teoritis dan konseptual. Apabila pengguna/kuasa pengguna barang mempunyai pengetahuan pengelolaan aset tetap yang memadai, maka pengelolaan aset tetap akan berjalan dengan efektif dan efisien dan pelaporan aset akan menjadi lebih akurat dan akuntabel.

2.1.5 Persepsi Etis

Menurut Robbins dan Judge (2007), persepsi mengacu pada pandangan atau interpretasi seseorang terhadap sesuatu, orang lain, atau peristiwa. Sedangkan etika adalah ilmu yang mempelajari tentang apa yang benar dan salah serta kewajiban moral, persepsi adalah reaksi langsung terhadap suatu peristiwa, sedangkan etika berkaitan dengan etika atau kesesuaian dengan standar perilaku yang diterima secara umum (Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, 2020). Definisi ini mengarah pada kesimpulan bahwa persepsi etis adalah proses dimana

seorang individu mempersepsikan atau memahami sesuatu, orang, atau peristiwa sesuai dengan standar moral dan pedoman perilaku yang diterima.

Robbins dan Judge (2007), sejumlah faktor, misalnya persepsi, objek, dan situasi, dapat menimbulkan persepsi berbeda terhadap suatu hal yang sama. Pengalaman orang yang mempersepsikan, signifikansi pengalaman, motivasi, dan sikap merupakan faktor penyusunnya. Unsur-unsur yang mempengaruhi suatu benda adalah kedekatan, kebaruan, suara, gerakan, latar belakang, dan ukuran. Sedangkan situasinya dipengaruhi oleh pekerjaan, lokasi, konteks sosial, dan waktu.

Menurut perspektif etika dalam pengelolaan aset, pengelola aset daerah dan pejabat pengambil keputusan lainnya perlu menyadari kode etik. Menurut Haryanto (2014), kepercayaan terhadap kualitas layanan merupakan kebutuhan kritis bagi pengelola aset, sehingga etika menjadi kebutuhan mendasar bagi pengelola aset daerah. Persepsi etis yang baik akan menghindarkan seorang pengelola aset dari pelanggaran kode etik yang berlaku saat menjalankan tugasnya, sehingga menghasilkan laporan yang lebih akurat mengenai aset yang dihasilkan.

2.1.6 Tekanan Atasan

Ketika seorang pegawai merasa mendapat tekanan dari atasannya, mereka mungkin mengalami situasi tegang yang mempengaruhi emosi serta kesejahteraan fisik dan psikologisnya. Seperti yang diungkapkan Mangkunegara dalam Sari dan Ruhayat (2017). Ketika seseorang menerima instruksi langsung dari tindakan orang lain, hal ini disebut pengaruh sosial dan juga dapat bermanifestasi sebagai tekanan dari atasan (Haryanto, 2014). Seseorang yang diberi wewenang mempunyai kekuasaan dan dapat mempengaruhi tindakan orang

lain. Kemampuan untuk memberikan pengaruh terhadap bawahan karena statusnya dalam hierarki organisasi inilah yang memberikan legitimasi kekuasaan tersebut (Milgran, dalam Hartanto dan Wijaya, 2001).

Ketika orang menerima perintah atau tekanan langsung dari orang lain yaitu dari pemimpin atau individu lain untuk bertindak dengan cara yang menyimpang dari profesionalisme, hal ini dikenal sebagai tekanan superior (Chitra, 2009). Seorang pengelola aset tetap tentu akan merasa tertekan untuk menuruti keinginan atasannya atau pihak lain, atau menghadapi masalah moral.

Menurut Sari dan Sudarma (2013), tekanan atasan yang bersifat konstruktif dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepatuhan pegawai terhadap aturan pelaporan keuangan, sehingga berdampak positif terhadap akurasi laporan yang dihasilkan. Dalam organisasi pemerintah daerah, atasan memiliki posisi strategis dalam membentuk budaya kerja dan menanamkan pentingnya ketepatan dan keandalan data aset sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah. Dengan pengawasan yang konsisten dan arahan yang jelas dari atasan, pegawai termotivasi untuk menyusun laporan aset tetap dengan lebih cermat dan akurat.

2.1.7 Kompleksitas Tugas

Kompleksitas tugas merupakan permasalahan yang dihadapi pengambil keputusan ketika dihadapkan pada tugas-tugas yang menantang karena keterbatasan keterampilan, ingatan, dan kemampuan mengintegrasikan masalah (Jamilah et al., 2007). Struktur dan tingkat kesulitan tugas merupakan dua komponen kunci kompleksitas tugas, menurut Haryanto (2014). Kesulitan tugas berkorelasi dengan kuantitas informasi yang tersedia, sedangkan struktur tugas berkaitan dengan kejelasan informasi tugas. Baik itu tugas tambahan atau tugas utama, ambiguitas dan struktur yang buruk menyebabkan kompleksitas tugas

(Restuningdiah dan Indriantoro, 2000). Ketika tugas tidak jelas, tugas menjadi tidak teratur dan membingungkan. Hal ini menyebabkan munculnya alternatif-alternatif yang berbeda dan dapat ditentukan sehingga tidak mungkin mengumpulkan informasi dan memperkirakan hasil. Menurut Restuningdiah dan Indriantoro (2000), kompleksitas tugas dapat berdampak negatif terhadap keberhasilan penyelesaian tugas.

Karena aset daerah merupakan sumber utama pendapatan asli suatu daerah dan memberikan nilai terbesar bagi seluruh laporan keuangan, maka pengelolaan aset daerah mempunyai kompleksitas tugas yang tinggi. Menurut Haryanto (2014), tingginya tingkat kompleksitas tugas pengelolaan aset daerah menyebabkan terjadinya perilaku disfungsional di kalangan pejabat pengelola aset, antara lain kurangnya akuntabilitas dan kinerja yang tidak konsisten. Karena kompleksitas tugas yang ekstrim, tidak ada data yang dapat dikumpulkan, sehingga membuat keputusan dan pelaporan aset oleh pejabat pengguna aset menjadi kurang akurat.

2.1.8 Komitmen Organisasi

Porter dan Steers (1979) menyatakan komitmen adalah kuatnya pengenalan dan keterlibatan seseorang dalam suatu organisasi tertentu. Organisasi adalah kolektivitas manusia yang aktivitas-aktivitasnya terkoordinasi dan terkontrol dalam dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mills & Mills, 2000). Komitmen terhadap organisasi merupakan suatu kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi (*identification*), kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi (*job involvement*), dan keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi bersangkutan (*loyalty*) yang dinyatakan oleh seorang pegawai terhadap organisasinya (Prisca, 2019). Pegawai yang memiliki komitmen akan bekerja

dengan penuh dedikasi untuk kepentingan organisasi karena pegawai yang memiliki komitmen tinggi menganggap bahwa hal penting yang harus dicapai adalah pencapaian tugas dalam organisasi. Pegawai yang memiliki komitmen yang tinggi juga memiliki pandangan yang positif dan akan melakukan yang terbaik untuk kepentingan organisasi.

Mayer dan Allen (1990) mengidentifikasi tiga dimensi komitmen dalam berorganisasi, yaitu:

1. *continuance commitment*, didefinisikan sebagai keterikatan anggota secara psikologis pada organisasi karena biaya yang ditanggung sebagai konsekuensi keluar organisasi. Anggota akan cenderung memiliki daya tahan atau komitmen yang tinggi dalam keanggotaan jika pengorbanan akibat keluar organisasi semakin tinggi.
2. *normative commitment*, yaitu keterikatan anggota secara psikologis dengan organisasi karena kewajiban moral untuk memelihara hubungan dengan organisasi.
3. *affective commitment*, adalah tingkat keterkaitan secara psikologis dengan organisasi berdasarkan seberapa baik perasaan yang didorong karena adanya kenyamanan, keamanan dan manfaat lain mengenai organisasi.

Dalam konteks pemerintahan, pegawai yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan menggunakan informasi yang dimiliki untuk menyusun laporan aset tetap secara tepat. Dengan adanya komitmen organisasi akan mempertahankan kepatuhan dalam penyajian laporan aset tetap sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

2.2 Tinjauan Emperis

Tinjauan emperis adalah suatu penelitian yang berasal dari beberapa penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh peneliti yang berbeda. Berikut uraian beberapa peneliti yang telah meneliti variabel-variabel yang mempengaruhi pelaporan aset tetap.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti dan Tahun	Variabel Dependen/ Independen	Hasil
1	Haryanto (2014)	Variabel Dependen: Akurasi Laporan Aset Daerah Variabel Independen: 1. Tekanan Ketaatan 2. Kompleksitas Tugas 3. Pengetahuan 4. Persepsi etis 5. Sistem Pengendalian Internal	1. Kompleksitas tugas dan tekanan kepatuhan seringkali menyebabkan rendahnya akurasi laporan aset tetap. 2. Pengetahuan dan persepsi etika mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keakuratan pelaporan aset daerah.
2	Nirwana dan Haliah (2018)	Variabel Dependen: 1. Kualitas Laporan Keuangan 2. Kinerja Pemerintah Daerah Variabel Independen: 1. Kompetensi 2. Regulasi 3. Politik	1. Kompetensi berpengaruh terhadap laporan keuangan, dan kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. 2. Laporan keuangan yang berkualitas berdampak tidak langsung terhadap kinerja pemerintah daerah, dan peraturan berdampak pada kualitas laporan keuangan. 3. Laporan keuangan yang baik berdampak tidak langsung terhadap kinerja pemerintah daerah, dan politik berdampak terhadap laporan keuangan yang baik.
3	Subrata, dkk (2018)	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Barang	1. Penerapan SPI yang tepat dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan BMD sehingga

		Variabel Independen: 1. Sistem Pengendalian Internal 2. Kemampuan Sumber Daya Manusia 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi	meningkatkan kualitas laporan BMD yang dihasilkan. 2. Kualitas laporan BMD yang dihasilkan secara umum akan meningkat sebanding dengan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam laporan tersebut. 3. Kualitas laporan BMD yang dihasilkan kemungkinan besar akan meningkat jika teknologi informasi digunakan secara lebih efektif dalam penyusunannya
4	Fahrurrozi (2019)	Variabel Dependen: 1. Kualitas Laporan Barang 2. Pencegahan Fraud Pengelolaan Barang Milik Daerah Variabel Independen: 1. Pemanfaatan SIMDA	1. Penerapan SIMDA tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan maupun pencegahan kecurangan dalam pengelolaan BMD. 2. Pencegahan terjadinya kecurangan dalam pengelolaan barang milik daerah tidak terlalu dipengaruhi oleh kualitas laporan keuangan.
5	Danang Widiyanto (2021)	Variabel Dependen: Akurasi Laporan Aset Daerah Variabel Independen: 1. Tekanan Atasan 2. Kompleksitas Tugas 3. Pengetahuan 4. Persepsi etis Variabel Moderasi: Sistem pengendalian internal	Temuan studi ini menunjukkan bahwa keakuratan pelaporan aset tetap dipengaruhi secara signifikan oleh tekanan superior dan persepsi etika. Sementara itu, keakuratan pelaporan aset tetap tidak dipengaruhi secara signifikan oleh kompleksitas tugas atau pengetahuan. Temuan lain menunjukkan bahwa variabel tekanan atasan, kompleksitas tugas, dan pengetahuan terhadap keakuratan pelaporan aset tetap tidak dimoderasi secara signifikan oleh sistem pengendalian internal; sebaliknya, sistem hanya secara signifikan memoderasi pengaruh variabel persepsi etis terhadap keakuratan pelaporan aset tetap.
6	Imbiri, dkk (2018)	Variabel Dependen: Akuntabilitas Publik Pemerintah Daerah	1. Akuntabilitas Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen tidak dipengaruhi pembukuan aset.

		Variabel Independen: 1. Inventarisasi 2. Pembukuan 3. Pelaporan Aset	2. Akuntabilitas Publik Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen tidak dipengaruhi oleh inventarisasi. 3. Akuntabilitas Publik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen tidak dipengaruhi oleh pelaporan aset
7	Astini (2018)	Variabel Dependen: Efektifitas Manajemen Barang Milik Daerah Variabel Independen: 1. Sistem Informasi 2. Sistem Pengendalian Internal Variabel Moderasi: Kualitas Aparatur	1. Sistem informasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap efektivitas manajemen BMD. 2. Efektifitas manajemen BMD dipengaruhi positif dan signifikan oleh SPI. 3. Pengaruh sistem informasi dan SPI pada efektivitas manajemen BMD dimoderasi oleh kualitas aparatur.
8	Karmila, dkk (2014)	Variabel Dependen: Keterandalan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Variabel Independen: 1. Kapasitas Sumber Daya Manusia 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi 3. Pengendalian Internal	Pemanfaatan teknologi informasi di Provinsi Riau berdampak besar terhadap keandalan pelaporan keuangan. Sementara itu, variabel SPI dan kapasitas SDM tidak mempunyai pengaruh nyata terhadap keakuratan pelaporan keuangan SKPD di Provinsi Riau.
9	Agatha, dkk (2020)	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Variabel Independen: 1. Kompetensi SDM 2. Penerapan SAP 3. <i>Good Governance</i>	Kualitas laporan keuangan dipengaruhi secara positif oleh seluruh variabel independen, baik secara simultan maupun parsial.
10	Rotty, dkk (2020)	Kualitatif	Determinan akurasi pelaporan aset tetap daerah pada

			Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara adalah: 1) Komitmen Kepala Daerah 2) Sumber Daya Manusia 3) Perangkat Lunak (<i>Software</i>) 4) Komunikasi dan koordinasi
11	Leiwakabessi (2021)	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Variabel Independen: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Variabel Moderasi: Komitmen Organisasi dan Motivasi	Sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD, kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Selanjutnya komitmen organisasi dapat memoderasi hubungan SPIP dan kualitas LKPD tetapi tidak dapat memoderasi hubungan kompetensi SDM dan kualitas LKPD. Sedangkan motivasi dapat memoderasi hubungan kompetensi SDM dan kualitas LKPD tetapi gagal memoderasi hubungan SPIP dan kualitas LKPD
12	Selva Temalagi dan Peter Arson (2021)	Variabel Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Variabel Independen: Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Inter Variabel Moderasi: Komitmen Organisasi	Kompetensi SDM berpengaruh pada kualitas LKPD, sistem pengendalian intern berpengaruh positif pada kualitas LKPD, Interaksi komitmen organisasi dengan kompetensi SDM dan sistem pengendalian intern berpengaruh pada kualitas LKPD

Sumber: data primer, diolah sendiri, 2023